



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kependudukan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera;
- b. bahwa untuk menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan kejelasan arah pembangunan kependudukan, diperlukan dokumen perencanaan berupa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025-2029

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas serta penataan administrasi kependudukan.
6. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disebut Peta Jalan adalah dokumen panduan lima tahunan yang menjabarkan strategi dan rencana aksi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat dengan pengintegrasian isu-isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengintegrasian pembangunan kependudukan ke dalam pembangunan daerah.

### Pasal 3

Peta Jalan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan daya saing penduduk;
- b. mewujudkan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- d. mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

### Pasal 4

Ruang lingkup Peta Jalan meliputi:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan mobilitas penduduk; dan

e. penataan administrasi kependudukan.

#### Pasal 5

Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diarahkan pada pencapaian struktur dan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

#### Pasal 6

Peningkatan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan produktivitas penduduk.

#### Pasal 7

Pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diarahkan pada penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

#### Pasal 8

Penataan persebaran dan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diarahkan pada pemerataan penduduk sesuai dengan daya dukung wilayah.

#### Pasal 9

Penataan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diarahkan pada peningkatan tertib administrasi dan pemanfaatan data kependudukan.

### BAB IV

#### KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA PETA JALAN

#### Pasal 10

(1) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ditetapkan untuk periode Tahun 2025–2029.

- (2) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 11

- (1) Peta Jalan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Sasaran Pembangunan Kependudukan;
  - c. BAB III Rencana Aksi; dan
  - d. BAB IV Penutup.
- (2) Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Peta Jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan Peta Jalan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan Peta Jalan dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kependudukan Daerah.
- (2) Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. ketua
  - b. sekretaris
  - c. anggota

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan secara berkala.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan pembangunan kependudukan daerah.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Peta Jalan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 23 Desember 2025

BUPATI SUMBA BARAT, 9

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 24



KABUPATEN  
SUMBA BARAT



YONWID 2408

# PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

## 2025-2029



TAHUN :  
2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis dan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam mengelola isu kependudukan secara komprehensif, terencana, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta berbagai regulasi turunannya.

Dokumen PJPK ini memuat gambaran menyeluruh tentang situasi kependudukan Kabupaten Sumba Barat saat ini, mencakup dinamika kuantitas penduduk, kualitas penduduk, kondisi keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan. Analisis situasi disajikan melalui matriks tekanan–kondisi–respons–dampak (PSRI), yang menggambarkan akar masalah, kondisi terkini, langkah respons kebijakan, serta dampak yang ingin dicapai pada masing-masing indikator prioritas pembangunan kependudukan.

Dokumen ini juga merumuskan arah kebijakan, strategi, serta target kinerja tahunan selama lima tahun (2025 – 2029) untuk mewujudkan lima pilar pembangunan kependudukan, yaitu:

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk,
2. Peningkatan Kualitas Penduduk,
3. Pembangunan Keluarga Berkualitas,
4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan
5. Penataan Administrasi Kependudukan.

Setiap indikator kinerja memiliki baseline tahun 2024 dan target capaian dari tahun 2025 hingga 2029, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi kinerja tahunan pemerintah daerah.

Selain itu, dokumen ini memuat Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan yang dijabarkan secara rinci berdasarkan indikator, program, kegiatan, serta perangkat daerah penanggung jawab. Penyusunan rencana aksi ini diikuti dengan pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana PJPK Kabupaten Sumba Barat, yang memiliki mandat mengoordinasikan, mensinergikan, serta memantau pelaksanaan PJPK secara lintas sektor. Struktur tata kelola dan pembagian tugas antar perangkat daerah disajikan untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

Harapan kami, dokumen PJPK ini dapat menjadi pedoman yang kuat bagi seluruh

pemangku kepentingan di Kabupaten Sumba Barat : pemerintah daerah, perangkat daerah, lembaga vertikal, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas desa, dalam upaya bersama mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, masyarakat berkualitas, dan pembangunan keluarga yang lebih kokoh demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan manusia yang berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga PJKP 2025 – 2029 dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah yang berorientasi pada manusia.

**BUPATI SUMBA BARAT,**



**YOHANIS DADE**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Tujuan .....	6
C. Sasaran .....	7
D. Dasar Hukum .....	7
E. Batasan Pengertian .....	9
F. Analisis Situasi Kependudukan Kabupaten Sumba Barat .....	11
BAB II SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 – 2029 .....	29
A. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Kinerja Pengelolaan Kuantitas Penduduk .....	29
B. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Kinerja Peningkatan Kualitas Penduduk .....	30
C. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Kinerja Pembangunan Keluarga .....	32
D. Arah Kebijakan, Strategi, Target Kinerja Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk .....	33
E. Arah Kebijakan, Strategi, Target Kinerja Penataan Administrasi Data Kependudukan .....	34
BAB III RENCANA AKSI TAHUN 2025 – 2029 .....	36
A. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan .....	36
B. Rencana Aksi Tahun 2025-2029 .....	40
1. Rencana Aksi Pengelolaan Kuantitas Penduduk .....	40
2. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Penduduk .....	42
3. Rencana Aksi Pembangunan Keluarga .....	53
4. Rencana Aksi Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk .....	56
5. Rencana Aksi Penataan Administrasi Data Kependudukan .....	57
BAB IV PENUTUP .....	58
A. Monitoring .....	58
B. Evaluasi .....	59
C. Pelaporan .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks PSRI Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025-2029 .....	11
Tabel 2 Target Kinerja Pengelolaan Kuantitas Penduduk 2025-2029.....	30
Tabel 3 Target Kinerja Peningkatan Kualitas Penduduk 2025-2029 .....	31
Tabel 4 Target Kinerja Pembangunan Keluarga 2025-2029.....	33
Tabel 5 Target Kinerja Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2025-2029.....	34
Tabel 6 Target Kinerja Penataan Administrasi Data Kependudukan 2025-2029.....	35
Tabel 7 Program dan Kegiatan Pengelolaan Kuantitas Penduduk.....	40
Tabel 8 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk .....	42
Tabel 9 Program dan Kegiatan Pembangunan Keluarga.....	53
Tabel 10 Program dan Kegiatan Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	56
Tabel 11 Program dan Kegiatan Penataan Administrasi Data Kependudukan.....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penduduk adalah modal dasar pembangunan, juga merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali, diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi terkendalinya jumlah, laju pertumbuhan, dan kualitas penduduk. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM).

Penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Dan sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Situasi kependudukan sedemikian kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya saat ini membutuhkan koordinasi lintas sektor. Dan Efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan ini seyogyanya bermula sejak fase perencanaan sampai implementasinya secara sedemikian rupa, sehingga akan dapat memperkecil kesenjangan konsep dengan implementasinya, menihilkan berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan.

Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang cepat, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah berpotensi menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Tanpa pengelolaan yang tepat, kondisi ini akan memperburuk ketimpangan wilayah, memperberat beban lingkungan, dan menurunkan efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, pengendalian kependudukan menjadi sangat penting agar pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengorbankan hak dan kesejahteraan generasi mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Kabupaten Sumba Barat dengan struktur penduduk seimbang, ditandai dengan TFR sebesar 3,14 akan mencapai momentum demografi berupa kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Inilah yang disebut dengan *demographic deviden* yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Penduduk pada fase ini betul-betul menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Pertanyaan besar adalah kapan dan bagaimana mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang tersebut. Oleh karenanya, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk pelaksanaannya maka diperlukan diperlukan suatu *Grand Design* atau Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang berfungsi menjabarkan target-target pembangunan dalam periode lima tahunan. Peta jalan ini juga diperlukan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur terhadap capaian yang harus diraih pada setiap tahapan pembangunan kependudukan.

## B. Tujuan

Tujuan penyusunan peta jalan ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sekaligus sebagai arah operasional periode waktu 5 tahunan yang diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu Peta jalan ini bertujuan memastikan kebijakan kependudukan yang terukur, tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah dan memperkuat komitmen berbagai pihak.

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan juga memiliki tujuan strategis yaitu :

1. Menjaga struktur penduduk tumbuh seimbang;  
Yaitu kondisi di mana jumlah fertilitas sama atau hampir sama (seimbang) dengan mortalitas, atau dapat dikatakan jumlah bayi yang dilahirkan

diharapkan sama atau hampir sama (seimbang) dengan jumlah kematian, sehingga penduduk cenderung tetap (*stationer*)

2. Pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan ;
3. Meningkatkan kualitas keluarga untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan masa depan yang sejahtera dan bahagia;
4. Distribusi penduduk yang seimbang secara spasial, ekologis dan sosial;
5. Memperluas cakupan administrasi kependudukan untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.

### C. Sasaran

Peta jalan pembangunan kependudukan Kabupaten Sumba Barat tahun 2025-2029, diarahkan untuk mencapai sasaran berikut :

1. Pengelolaan kuantitas penduduk;  
Yaitu untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Kondisi ideal dari sisi kuantitas dalam jangka panjang akan tercapai jika Penduduk Tumbuh Seimbang.
2. Peningkatan kualitas penduduk;  
Yaitu dengan menitikberatkan pada pendekatan pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
3. Pembangunan Keluarga;  
Yaitu untuk mewujudkan kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat.
4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;  
Yaitu untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dan juga daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Penataan administrasi data kependudukan.  
Yaitu dengan menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari penyusunan kebijakan berbasiskan pada fakta dan data (*evidence based policy making*).

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.

#### **E. Batasan Pengertian**

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat;
3. Pembangunan Kependudukan adalah mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan;
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Perangkat Daerah adalah organisasi atau pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal;
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, Tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak;
11. Pembangunan Keluarga adalah mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat;
12. Penataan Persebaran Penduduk adalah menata persebaran penduduk agar

serasi dengan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

13. Pengarahan mobilitas penduduk adalah mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya lingkungan

## F. Analisis Situasi Kependudukan Kabupaten Sumba Barat

Tabel 1  
Matriks PSRI Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025-2029

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
A.	Pengelolaan Kuantitas Penduduk				
1.	Total Fertility Rate (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi sosial ekonomi seperti angka kemiskinan yang masih tinggi</li> <li>Pemahaman masyarakat terhadap keluarga berkualitas masih rendah</li> <li>Kepercayaan/budaya untuk wajib memiliki anak laki-laki dalam keluarga.</li> <li>Keberadaan anak untuk dijadikan tenaga kerja dalam keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TFR Kabupaten Sumba Barat tahun 2024 sebesar 2,92 %</li> <li>TFR Provinsi NTT tahun 2024 sebesar 2,71 %</li> <li>TFR Nasional tahun 2023 sebesar 2,14%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilok</li> <li>Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</li> <li>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</li> <li>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</li> <li>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</li> <li>Dukungan Operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terkendalinya Angka kelahiran sehingga pelaksanaan program-program peningkatan kualitas penduduk lebih optimal</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
2.	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih Tingginya angka pernikahan usia dini di kalangan remaja.</li> <li>Kurangnya pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi di sekolah dan keluarga.</li> <li>Norma budaya dan sosial yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASFR usia 15–19 tahun Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebesar 16,1</li> <li>Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1.000 perempuan usia tersebut, ada 16,1 orang yang melahirkan dalam setahun.</li> <li>ASFR usia 15–19 tahun Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar 21,5</li> <li>ASFR usia 15–19 tahun Indonesia Tahun 2023 sebesar 19,7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan KB Bergerak</li> <li>Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.</li> <li>Sosialisasi dan Edukasi pendidikan reproduksi pada remaja.</li> <li>Penyusunan dan Implementasi Kurikulum Pendidikan Remaja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan angka ASFR pada kelompok usia 15–19 tahun dalam jangka menengah.</li> <li>Peningkatan kesadaran remaja terhadap pentingnya pendidikan dan perencanaan hidup</li> <li>Meningkatnya partisipasi remaja dalam pendidikan formal.</li> <li>Penurunan angka pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan.</li> </ul>
3.	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern ( <i>Proportion of demand satisfied, by modern</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dan dampaknya bagi perkembangan ketahanan keluarga</li> <li>Adanya mitos efek samping ber KB seperti peningkatan berat badan, jerawat, atau risiko kesehatan lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 adalah 77,3%.</li> <li>Dari data tersebut ada sekitar 77,3 % Perempuan yang ingin mencegah kehamilan dan ada sekitar 22,7% yang belum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilok</li> <li>Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</li> <li>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menekan jumlah kematian ibu dan bayi,</li> <li>Terkendalinya pertumbuhan penduduk,</li> <li>peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat serta kualitas hidup keluarga</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
	<p>methods)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, biaya yang mahal</li> <li>layanan kesehatan yang kurang berkualitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern Provinsi NTT Tahun 2024 adalah 62,6 %</li> </ul>	<p>Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</li> <li>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</li> <li>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</li> <li>Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</li> <li>Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</li> </ul>	
<b>B</b>	<b>Peningkatan Kualitas Penduduk</b>				
4.	<p>Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kemiskinan dan beban ekonomi keluarga mendorong anak untuk bekerja lebih awal</li> <li>Rendahnya motivasi belajar siswa</li> <li>kurangnya kesadaran akan pentingnya bersekolah</li> <li>Akses pendidikan di daerah pedesaan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RLS Kabupaten Sumba Barat tahun 2024 sebesar 7,17 tahun, setara jenjang SLTP</li> <li>RLS Provinsi NTT Tahun 2024 yang sebesar 8,02 tahun</li> <li>RLS Nasional Tahun 2024 yang sebesar 9,22 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengurangan Biaya Pendidikan melalui Pengelolaan Dana BOS/BOP</li> <li>Peningkatan Kualitas Pembelajaran dikelas</li> <li>Peningkatan kualitas Sarana dan prasarana Pendidikan</li> <li>Peningkatan Kompetensi Guru</li> <li>Pengembangan kurikulum muatan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produktivitas dan keterampilan Masyarakat</li> <li>Menekan angka pengangguran</li> <li>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</li> <li>Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>terpencil masih terbatas</li> <li>Ketersediaan guru berkualitas dan tenaga pendidik masih kurang</li> <li>Infrastruktur pendidikan belum merata (jalan, listrik, bangunan sekolah)</li> </ul>			
5.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya minat melanjutkan pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga.</li> <li>Kurangnya informasi tentang beasiswa bagi lulusan SMA/SMK.</li> <li>Ketertinggalan infrastruktur dan akses transportasi ke perguruan tinggi.</li> <li>Budaya yang masih memprioritaskan anak bekerja setelah tamat sekolah menengah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>APK Pendidikan Tinggi Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 diperkirakan <b>8,12%</b>. Artinya dari 100 penduduk usia kuliah, hanya sekitar 8 orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi.</li> <li>APK Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar <b>16,24%</b>.</li> <li>APK Nasional Tahun 2024 sebesar <b>31,45%</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.</li> <li>Penguatan kerja sama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi.</li> <li>Sosialisasi pentingnya pendidikan tinggi melalui sekolah dan desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas SDM muda Kabupaten Sumba Barat.</li> <li>Meningkatnya peluang kerja lulusan perguruan tinggi.</li> <li>Penurunan angka pengangguran terselubung.</li> <li>Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sektor pendidikan.</li> </ul>
6.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan lapangan kerja yang sesuai kompetensi lulusan.</li> <li>Kesenjangan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.</li> <li>Rendahnya kemampuan teknis dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja lulusan baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pekerja lulusan menengah-tinggi yang bekerja sesuai bidangnya di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 mencapai <b>43,6%</b>.</li> <li>Angka ini masih di bawah rata-rata Provinsi NTT yaitu <b>51,2%</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan berbasis kompetensi (Vokasi) bekerja sama dengan BLK dan UMKM.</li> <li>Sertifikasi kompetensi tenaga kerja melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).</li> <li>Peningkatan kerja sama dunia usaha dan dunia industri untuk magang dan penempatan tenaga kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produktivitas tenaga kerja.</li> <li>Penurunan pengangguran lulusan baru.</li> <li>Tenaga kerja lebih terampil pada sektor yang sesuai keterampilan.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
7.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi kemiskinan daerah yang memengaruhi pola konsumsi rumah tangga</li> <li>Kurangnya pemahaman keluarga tentang pola makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil dan balita</li> <li>Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan kehamilan (antenatal dan postnatal)</li> <li>Akses masyarakat terhadap sarana bersih masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevalensi Stunting Kab. Sumba Barat berdasarkan SSGI Tahun 2024 sebesar 35,2 % sedangkan berdasarkan E-PPBGM tahun 2024 adalah 19,1%</li> <li>Prevalensi Stunting Provinsi NTT berdasarkan SSGI Tahun 2024 sebesar 37 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumba Barat Bebas Stunting melalui Gerakan Orang tua asuh</li> <li>Optimalisasi program 3 K (Kolam, Kandang, Kebun) disetiap keluarga</li> <li>Peningkatan Kapasitas layanan Posyandu</li> <li>Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat</li> <li>Pemenuhan Hak Anak melalui program PAUD-HI</li> <li>Optimalisasi layanan kesehatan primer (ILP) pada Puskesmas, Pustu dan Posyandu.</li> <li>Peningkatan Pemberian TTD pada remaja putri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas SDM yang sehat dan produktif</li> </ul>
8.	Jumlah Kasus Kematian Balita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya Perawatan Kesehatan Selama Kehamilan dan Kelahiran akibat minimnya akses ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan</li> <li>Kondisi Ekonomi dan Sosial (kemiskinan) sehingga pengetahuan tentang kesehatan ibu dan bayi masih rendah</li> <li>Kekurangan tenaga kesehatan terlatih seperti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kasus kematian balita kab.sumba barat tahun 2024 sebanyak 10 kasus, Tahun 2023 sebanyak 11 Kasus, Tahun 2022 sebanyak 52 Kasus, Tahun 2021 sebanyak 32 Kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Kounseling Menyusui (End User)</li> <li>Gerakan Bumil Sehat</li> <li>Penyediaan biaya Transport Rujukan bagi ibu melahirkan</li> <li>Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita</li> <li>Pelaksanaan Audit Maternal dan Neonatal</li> <li>Penyusunan Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan IPM sektor kesehatan dan pencapaian SDGs poin 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan)</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		<p>dokter spesialis kandungan dan bidan profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan (ANC) dan persalinan di fasilitas kesehatan</li> </ul>			
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pengetahuan ibu tentang keluarga berencana</li> <li>Risiko kehamilan dengan jarak kehamilan yang dekat dan tanda hamil</li> <li>Pemahaman ibu dan keluarga tentang tanda-tanda bahaya/risiko kehamilan masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kasus kematian ibu kabupaten sumba barat tahun 2024 sebanyak 3 kasus, tahun 2023 sebanyak 3 kasus, tahun 2022 tidak ada kasus, tahun 2021 sebanyak 1 kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Konseling Menyusui (End User)</li> <li>Gerakan Bumil Sehat</li> <li>Penyediaan biaya Transport Rujukan bagi ibu melahirkan</li> <li>Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita</li> <li>Pelaksanaan Audit Maternal dan Neonatal</li> <li>Penyusunan Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya prevalensi stunting</li> <li>Menurunnya angka kemiskinan</li> <li>Meningkatnya pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait kesehatan ibu dan anak</li> </ul>
10	Tingkat Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman masyarakat akan penerapan pesta adat dan budaya sekarang yang sudah berbeda dibandingkan zaman dahulu.</li> <li>Masih ada lahan produktif yang tidak dimanfaatkan</li> <li>Tingkat pengangguran terbuka dan setengah menganggur yang tinggi</li> <li>Akses terbatas terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebanyak 26,52%; tahun 2023 sebanyak 27,17%; tahun 2022 sebanyak 27,47%; tahun 2021 sebanyak 28,39%.</li> <li>Presentase masyarakat miskin kabupaten sumba barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan Sosial KAT melalui penyuluhan</li> <li>Bantuan Sosial rumah sejahtera terpadu</li> <li>Pengelolaan dan Pemutakhiran Data DTSEN</li> <li>Pemberian Bantuan Pemasangan Meteran Listrik Baru</li> <li>Bantuan Pemakanan bagi anak terlantar, disabilitas dan Lansia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya angka pengangguran</li> <li>Anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang berkualitas</li> <li>Daya beli masyarakat tinggi</li> <li>Hak-hak dasar seperti kesejahteraan, pekerjaan dan hidup layak terpenuhi</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		<p>pendidikan berkualitas, layanan kesehatan dan pelatihan keterampilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastuktur dasar (jalan, listrik, air bersih) belum merata terutama di pedalaman</li> </ul>	<p>tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi NTT (19,96%) dan nasional (9,54%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Sandang bagi anak terlantar, disabilitas dan Lansia</li> <li>Bantuan Alat Bantu bagi anak terlantar, disabilitas dan Lansia</li> <li>Bantuan uang kepada Individu, Keluarga dan Disabilitas tidak mampu</li> <li>Bantuan Modal bagi PMKS</li> <li>Pemberian Akses Layanan Pendidikan melalui Sekolah Rakyat</li> <li>Pemberdayaan Masyarakat Translok melalui bantuan rumah RTJK serta Bantuan Benih ikan dan anakan buah-buahan</li> <li>Pembangunan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana</li> <li>Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni</li> <li>Pemberian Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa keluarga tidak mampu</li> </ul>	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Wanita Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beban ganda perempuan (domestik &amp; ekonomi).</li> <li>Rendahnya akses pelatihan kerja bagi perempuan.</li> <li>Minimnya kesempatan kerja ramah perempuan di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 yaitu 72,69 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Modal Usaha bagi Perempuan</li> <li>Fasilitasi Pengurusan ijin tenaga kerja wanita (TKW) ke Luar Negeri</li> <li>Sosialisasi Peran dan Keterlibatan Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kontribusi ekonomi perempuan.</li> <li>Kemandirian ekonomi keluarga meningkat.</li> <li>Pengurangan kesenjangan gender dalam pasar kerja.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		pedesaan.		<ul style="list-style-type: none"> <li>dibidang Politik</li> <li>Pelatihan keterampilan produktif bagi perempuan (kuliner, tenun, UMKM).</li> <li>Program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui PKK dan OPD terkait.</li> <li>Fasilitasi pembentukan kelompok usaha perempuan desa.</li> </ul>	
12	Persentase Pekerja Informal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya lapangan kerja formal.</li> <li>Rendahnya tingkat pendidikan mayoritas penduduk.</li> <li>Kurangnya akses pelatihan kerja formal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pekerja informal Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebesar 78,4%.</li> <li>Angka ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTT 74,1%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Penyediaan Jaminan sosial/BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal</li> <li>Pemberdayaan UMKM untuk transisi menuju usaha formal.</li> <li>Fasilitasi perizinan usaha mikro gratis.</li> <li>Pelatihan literasi keuangan dan manajemen usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan perlindungan tenaga kerja informal.</li> <li>Penurunan kerentanan ekonomi keluarga.</li> <li>Meningkatnya produktivitas UMKM lokal.</li> </ul>
13	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya lapangan kerja inklusif.</li> <li>Rendahnya pemahaman perusahaan tentang ketenagakerjaan disabilitas.</li> <li>Aksesibilitas fasilitas kerja masih terbatas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 adalah 1,8%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Keterampilan bagi disabilitas</li> <li>Sosialisasi ketenagakerjaan inklusi kepada perusahaan.</li> <li>Peningkatan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas meningkat.</li> <li>Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial.</li> <li>Mendorong penerapan prinsip inklusivitas di sektor kerja.</li> </ul>
14	Gini Ratio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lemahnya daya beli masyarakat</li> <li>Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Gini Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 adalah 0,325</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Modal Usaha Bagi Pengusaha kecil</li> <li>Pelatihan keterampilan usaha kerajinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tidak mengalami kesenjangan sehingga terjadi pemerataan</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
15	PDRB Per Kapita	<p>wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketimpangan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan layak</li> <li>• Akses terbatas ke sumber daya produktif (lahan, modal, teknologi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan tersebut, ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat masuk kategori sedang</li> <li>• Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sumba Barat tahun 2024 yaitu Rp 10,560</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pengurusan ijin tenaga kerja wanita (TKW) ke Luar Negeri</li> <li>• Promosi Penanaman Modal melalui website, Leaflet/brosur</li> <li>• Penataan Kemudahan layanan perizinan melalui Penataan Mall Pelayanan Publik</li> <li>• Melakukan investasi dalam pendidikan dan kesehatan</li> <li>• Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja</li> <li>• Pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata</li> <li>• Menjaga stabilitas inflasi dan ketersediaan bahan pokok</li> <li>• Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mencapai swasembada pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kenaikan pendapatan rata-rata penduduk.</li> <li>• Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan).</li> <li>• Penurunan tingkat kemiskinan seiring membaiknya daya beli masyarakat.</li> <li>• Tumbuhnya iklim investasi daerah yang berkelanjutan akibat meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat.</li> <li>• Peningkatan kualitas layanan publik karena kemampuan fiskal daerah ikut terdorong.</li> <li>• Kontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta percepatan pencapaian target pembangunan daerah.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesenjangan yang begitu besar antara ketersediaan kesempatan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumba Barat saat ini adalah 3,5%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan keterampilan usaha kerajinan</li> <li>Bantuan Modal Usaha Bagi Pengusaha kecil</li> <li>Mendirikan badan seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa untuk menggerakkan ekonomi</li> <li>Mengembangkan sektor UMKM melalui pelatihan, membantu akses permodalan dan kemudahan regulasi</li> <li>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan membuat Balai Latihan Kerja (BLK) agar diasah keterampilan dan kemampuan masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing</li> <li>Menyalurkan bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan angka pengangguran terbuka</li> <li>Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal</li> <li>Terbukanya lapangan kerja produktif</li> <li>Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat usia produktif</li> <li>Terbangunnya sistem ketenagakerjaan yang adaptif dan inklusif di daerah</li> </ul>
17	Persentase Kepemilikan NPWP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya literasi perpajakan.</li> <li>Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal.</li> <li>Akses terhadap layanan pendaftaran pajak masih terbatas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penduduk wajib pajak yang memiliki NPWP di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebesar 23,4%.</li> <li>Angka ini masih di bawah rata-rata Provinsi NTT 33,1%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</li> <li>Sosialisasi pentingnya NPWP melalui desa, gereja, dan sekolah.</li> <li>Layanan jemput bola pembuatan NPWP di desa.</li> <li>Integrasi data dengan Disdukcapil untuk validasi wajib pajak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kepatuhan pajak masyarakat.</li> <li>Peningkatan penerimaan negara/daerah untuk pembangunan.</li> <li>Basis data wajib pajak yang lebih akurat.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
C	<b>Pembangunan Keluarga</b>				
18	Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beban ekonomi keluarga masih tinggi</li> <li>Keterbatasan akses terhadap layanan dasar keluarga (kesehatan, pendidikan dan perlindungan anak)</li> <li>Minimnya pemahaman tentang membina keluarga dalam pola asuh, perencanaan keluarga dan peran gender</li> <li>Tingginya beban perempuan dalam keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banyak keluarga berada pada kondisi rentan baik secara ekonomi maupun sosial</li> <li>Kondisi I-Bangga Kabupaten Sumba Barat tahun 2024 yaitu 59,3 masuk kategori cukup baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan Fasilitas Pendidikan Kependudukan</li> <li>Penguatan Kapasitas Pokja Kampung KB</li> <li>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui, Rapat Koordinasi Desa (RakorDes), dan Minilok</li> <li>Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</li> <li>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</li> <li>Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</li> <li>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</li> <li>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</li> <li>Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</li> <li>Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya ketahanan keluarga dari segi ekonomi, sosial dan psikologis</li> <li>Penurunan angka perceraian, KDRT dan kekerasan terhadap anak</li> <li>Dukungan keluarga terhadap pembangunan SDM menjadi lebih kuat</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
19	Indeks Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya angka kemiskinan keluarga yang berdampak terbatasnya hak anak yang dipenuhi</li> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan anak</li> <li>Minimnya tenaga profesional (psikolog anak, pekerja sosial, konselor) di wilayah pedesaan)</li> <li>Akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan hukum bagi anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya anak yang mengalami kekerasan</li> </ul>	<p>dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peringatan Hari Anak Nasional</li> <li>Pembentukan Desa Layak Anak</li> <li>Penyelenggaraan PAUD-HI</li> <li>Kampanye Perlindungan Anak</li> <li>Pelatihan Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus</li> <li>Kordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas PAUD-HI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perilaku tindak kekerasan pada anak masih terjadi padahal PATBM telah dibentuk di setiap desa/kelurahan</li> <li>Masih ada desa yang walaupun sudah menjadi desa layak anak tapi tindakan kekerasan masih terjadi</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktor ekonomi membuat masyarakat kesulitan membuat rumah layak huni</li> <li>Keterbatasan anggaran untuk membantu masyarakat miskin untuk membuat rumah layak huni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio rumah layak huni bagi kabupaten sumba barat tahun 2024 adalah 0,45. Atau dikatakan masih sangat rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Bantuan Perumahan dari pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi rumah yang tidak layak huni menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental</li> <li>Kohesi sosial dan menghambat pendidikan anak karena tidak tersedianya ruang belajar yang memadai</li> <li>Kondisi rumah yang buruk dapat menyebabkan peningkatan biaya perawatan kesehatan dan penurunan produktivitas kerja</li> </ul>
21	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran dan perilaku masyarakat masih rendah</li> <li>Keterbatasan infrastruktur dan pendanaan untuk mengalokasikan anggaran di bidang sanitasi</li> <li>dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan dapat mengancam akses sanitasi yang sudah ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2024 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mencapai 60,76%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah akan membuat dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) sebagai salah satu syarat agar bisa mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat</li> <li>Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat melalui edukasi, program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan penguatan kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti diare, malaria, cacingan, dan stunting.</li> <li>Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat melalui lingkungan yang lebih bersih dan higienis.</li> <li>Peningkatan produktivitas masyarakat karena berkurangnya angka kesakitan.</li> <li>Lingkungan pemukiman menjadi lebih layak huni dan sehat.</li> <li>Terbangunnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga.</li> <li>Meningkatnya efektivitas program kesehatan dan sanitasi, termasuk pencapaian target SDGs khususnya tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak).</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
22	Indeks Lansia Berdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masalah kesehatan seperti penyakit kronis, penurunan fungsi fisik, malnutrisi, gangguan panca indera pada lansia</li> <li>Keterbatasan akses layanan kesehatan berkualitas bagi lansia terutama di pedesaan</li> <li>Minimnya program pemberdayaan lansia berbasis komunitas atau keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian Indeks Lansia Berdaya Kabupaten Sumba Barat tahun 2024 yaitu 63,2</li> <li>Capaian nasional tahun 2024 adalah 58 dimana nilai Sumba Barat sudah melampaui nasional</li> <li>Nilai 63,2 sudah dikategorikan cukup tangguh atau cukup berdaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</li> <li>Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</li> <li>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas hidup lansia melalui akses layanan kesehatan, sosial, dan lingkungan yang lebih ramah lansia.</li> <li>Meningkatnya kemandirian lansia dalam aktivitas sehari-hari sehingga mengurangi ketergantungan pada keluarga.</li> <li>Penurunan angka kesakitan dan risiko penyakit kronis akibat peningkatan layanan kesehatan preventif dan promotif.</li> <li>Penguatan peran lansia dalam keluarga dan masyarakat melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan.</li> <li>Meningkatnya kesejahteraan psikologis lansia karena adanya ruang partisipasi, penghargaan, dan perlindungan sosial.</li> <li>Berkontribusi terhadap terwujudnya masyarakat yang inklusif dan mendukung pencapaian target pembangunan SDGs (khususnya tujuan 3 dan 10).</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan pemahaman orang tua mengenai kembang remaja sehingga menerapkan pola asuh yang tepat</li> <li>Masalah ekonomi keluarga sehingga orang tua fokus pada pemenuhan materi tetapi mengabaikan kebutuhan emosional dan perkembangan remaja</li> <li>Kurangnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan bisa menimbulkan efek negatif seperti kesejahteraan fisik dan psikologis remaja</li> <li>Kader sudah menyusun kegiatan BKR tiap bulan tetapi masih banyak orangtua dari remaja yang tidak hadir karena alasan sibuk dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian Sumba Barat Tahun 2024 adalah 82,1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</li> <li>Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</li> <li>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas hubungan orang tua-remaja sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan suportif.</li> <li>Penurunan perilaku berisiko pada remaja seperti pernikahan dini, kenakalan remaja, penyalahgunaan zat, dan kekerasan.</li> <li>Meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis remaja berkat pola asuh yang lebih baik dan responsif.</li> <li>Terciptanya keluarga yang lebih siap menghadapi tantangan perkembangan remaja, termasuk pendidikan, pergaulan, serta penggunaan media digital.</li> <li>Peningkatan capaian pendidikan remaja karena dukungan keluarga terhadap aktivitas belajar dan perencanaan masa depan.</li> <li>Terwujudnya ketahanan keluarga yang lebih kuat sehingga mendukung peningkatan kualitas SDM daerah secara berkelanjutan.</li> <li>Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan biaya</li> </ul>
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada masyarakat yang belum sadar dan paham tentang manfaat JKN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepesertaan JKN Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 yaitu 84,11%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan biaya</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan ekonomi masyarakat sehingga kepesertaan JKN tidak menjadi prioritas</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan beban keuangan akibat pengeluaran kesehatan rumah tangga</li> <li>Terwujudnya sistem perlindungan sosial yang inklusif dan peningkatan status kesehatan masyarakat</li> <li>Kemajuan capaian indikator SDGs terkait kesehatan dan kesejahteraan</li> </ul>
<b>D Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk</b>					
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang program Kampung KB dan pentingnya Keluarga Berencana (KB)</li> <li>Masih ada pandangan yang menganggap bahwa KB adalah urusan wanita pria sedangkan pria cenderung pasif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 yaitu 1,3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain</li> <li>Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas</li> <li>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas</li> <li>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan terhadap stunting belum maksimal</li> <li>Masih ada keluarga yang belum terlayani dengan baik dalam program perlindungan sosial</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
26	Kepadatan Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya lapangan kerja di daerah.</li> <li>Migrasi keluar usia produktif ke kota-kota besar.</li> <li>Ketimpangan pembangunan pusat-desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepadatan penduduk Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 yaitu 65 jiwa/km<sup>2</sup>.</li> <li>Net Migration Rate (NMR) Tahun 2024 sebesar <b>-0,42</b> (lebih banyak yang keluar dibanding masuk).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi desa.</li> <li>Pembukaan lapangan kerja lokal melalui UMKM dan sektor pariwisata.</li> <li>Penyediaan data migrasi digital berbasis desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengurangan arus migrasi keluar.</li> <li>Pemberdayaan ekonomi lokal meningkat.</li> <li>Penyebaran penduduk lebih seimbang antar wilayah.</li> </ul>
<b>E Integrasi Data Kependudukan</b>					
27	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya sadar dan paham tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akta Kelahiran di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 mencapai 95,62%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan perlindungan hukum dan hak-hak anak dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial</li> <li>Tersedianya data kependudukan yang valid untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran</li> </ul>
28	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya kesadaran melaporkan perceraian ke pengadilan agama.</li> <li>Lokasi kantor layanan pencatatan sipil relatif jauh.</li> <li>Biaya proses administrasi dirasakan mahal oleh Masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan Akta Cerai Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebesar <b>12,4%</b> dari estimasi pasangan bercerai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.</li> <li>Layanan keliling akta cerai di desa/kelurahan.</li> <li>Kerja sama dengan Pengadilan Agama terkait pelaporan otomatis hasil putusan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepastian hukum bagi pasangan pascacerai.</li> <li>Kemudahan mengurus hak anak dan pembagian harta.</li> <li>Data perceraian lebih akurat untuk perencanaan program keluarga.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat Ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
29	Cakupan kepemilikan Akta Nikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktor ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat masih rendah tentang pentingnya memiliki akta nikah</li> <li>Akses terbatas misalnya lokasi kantor disdukcapil masih jauh dari tempat tinggal masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2024 pasangan yang berakte nikah di Kabupaten Sumba Barat mencapai 25,92%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkawinan tidak diakui oleh negara</li> <li>Pasangan dan anak-anak memiliki hak hukum yang tidak terlindungi</li> <li>Anak dari perkawinan tidak tercatat sulit menuntut haknya dari ayah jika terjadi perceraian.</li> </ul>
30	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kewajiban administrasi setelah kematian.</li> <li>Jarak layanan Disdukcapil dan belum semua desa melakukan pelayanan online.</li> <li>Kesadaran keluarga untuk melapor masih kurang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan akta kematian di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebesar 41,7%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pelayanan pencatatan sipil.</li> <li>Integrasi data kematian dengan fasilitas kesehatan dan desa.</li> <li>Program "WAJAR LAPOR KEMATIAN" bekerja sama dengan aparat desa dan gereja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data kematian lebih akurat untuk perencanaan penduduk.</li> <li>Memudahkan keluarga mengurus ahli waris dan administrasi lain.</li> <li>Mendukung validasi DTKS dan JKN.</li> </ul>

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Sumba Barat Tahun 2025

## BAB II

### SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 – 2029

Perumusan arah kebijakan , strategi dan target pembangunan kependudukan didasarkan pada sasaran Pembangunan kependudukan yang dikenal dengan 5 (lima) pilar utama pembangunan kependudukan , yaitu:

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk.
2. Peningkatan Kualitas Penduduk.
3. Pembangunan Keluarga Berkualitas.
4. Pembangunan Persebaran dan Mobilitas Penduduk.
5. Penataan Administrasi Kependudukan.

Masing-masing sasaran dijabarkan melalui kebijakan umum, Strategi Indikator Kinerja dan Target Tahunan (5 Tahun). Berikut adalah uraian kebijakan, strategi, indicator kinerja dan target tahunan selama lima periode dengan sasaran utama pembangunan kepedudukan, yaitu :

#### **A. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Kinerja Pengelolaan Kuantitas Penduduk**

Arah Kebijakan :

Penguatan efektivitas program pengelolaan jumlah penduduk melalui layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau.

Strategi :

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja melalui integrasi kurikulum pendidikan serta penguatan peran komunitas, guna menunda usia kawin pertama dan mencegah kehamilan tidak diinginkan;
2. Mengurangi beban biaya pengasuhan dan pendidikan anak melalui insentif dan program perlindungan sosial, guna mendorong keputusan berkeluarga yang terencana dan pencapaian fertilitas yang seimbang;
3. Memperkuat sosialisasi dan kampanye program keluarga berencana berbasis budaya lokal dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda, khususnya di wilayah dengan tingkat kelahiran tinggi;
4. Memperluas akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi yang berkualitas, inklusif, dan menyeluruh di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Tabel 2  
Target Kinerja Pengelolaan Kuantitas Penduduk 2025-2029

Tujuan Strategis	Indikator	Base line 2024	Sumber Data	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Mewujudkan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang	TFR per WUS usia 15-49 Tahun	2,92	BKKBN	2,86	2,89	2,88	2,86	2,85
	ASFR 15-19)	16,1	BKKN	16,1	16,0	16,0	15,9	15,9
	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi ( <i>demand satisfied</i> )	66,7	BKKN	67,1	67,5	67,8	68,2	68,5

#### B. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Kinerja Peningkatan Kualitas Penduduk

Arah Kebijakan :

Transformasi sistem pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan bonus demografi secara inklusif.

Strategi :

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah Masyarakat;
2. Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi;
3. Meningkatkan pekerja sesuai dengan bidang keahlian;
4. Menurunkan angka stunting pada bayi dan balita;
5. Menurunkan angka kematian Ibu dan Balita;
6. Menurunkan kemiskinan ekstrim;
7. Meningkatkan angka partisipasi kerja Perempuan;
8. Peningkatan akses Angkatan kerja pada disabilitas di sektor formal;
9. Meningkatkan Gini Ratio dan PDRB Daerah;
10. Menyediakan lapangan pekerjaan;

Tabel 3  
Target Kinerja Peningkatan Kualitas Penduduk 2025-2029

Tujuan Strategis	Indikator	Base line 2024	Sumber Data	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Mewujudkan pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan	Rata-rata lama sekolah	7,17	BPS	7,27	7,50	8,00	8,50	9,00
	APK perguruan tinggi	24,42	BPS	25,13	25,86	26,43	27,02	27,76
	Persentase pekerja lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	43,6%	BPS	47%	48%	49%	50%	51%
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	35,2	Target Bappenas menggunakan perhitungan SSGI	32,8	30,6	28,7	26,8	25,1
	Jumlah Kematian Balita	0 Kasus	Renstra Dinkes	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
	Jumlah Kematian Ibu	5 Kasus	Renstra Dinkes	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
	Tingkat kemiskinan	26,52 %	BPS	26,37%	25,57 %	24,77 %	23,97 %	23,17 %
	Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan	72,69	BPS	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00
	Persentase Pekerja Informal	77,40 %	BPS	75%	70%	65%	60%	55%
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	18%	BPS	18,6%	19,2%	19,8%	20,4%	21,0%
	Gini Ratio	0,277	BPS	0,270	0,263	0,256	0,248	0,240
	PDRB Perkapita (ADHB)/Ribu Rupiah	19.387	BPS	20.243	21,125	22,351	23,028	24,184
	Tingkat pengangguran terbuka	3,5	BPS	3,5	3,38	3,26	3,14	3,02

Tujuan Strategis	Indikator	Base line 2024	Sumber Data	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Presentase Kepemilikan NPWPD (%)	80%	Bapenda	85%	87%	89%	90%	95%

### C. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Kinerja Pembangunan Keluarga

Arah Kebijakan :

Penguatan ketahanan dan fungsi keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Strategi :

1. Edukasi pranikah, literasi keuangan rumah tangga, dan layanan konseling keluarga;
2. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan ramah keluarga;
3. Penyediaan layanan dukungan keluarga berbasis komunitas seperti ruang bermain anak dan pusat pembelajaran keluarga;
4. Penguatan peran keluarga dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak;
5. Penguatan ketahanan psikososial keluarga dalam menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan budaya.

Tabel 4  
Target Kinerja Pembangunan Keluarga 2025-2029

Tujuan Strategis	Indikator	Base line 2024	Sumber Data	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Pembangunan keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,3	BKKBN	60,8	62,3	63,7	65,0	66,2
	Indeks Perlindungan Anak	53,10	DP3A Propinsi	53,12	53,13	53,25	53,45	62,11
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	0,45	Dinas PUPR	0,66	0,86	1,07	1,27	1,48
	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	60,76 %	Renstra Dinas PUPR	74%	76%	78%	80%	82%
	Indeks Lansia berdaya	63,2	BKKBN	63,6	63,9	64,3	64,7	65,1
	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	82,1	BKKBN	83,4	84,7	85,8	86,9	87,9
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	84,11 %	Dinkes	84,11 %	84,11 %	83,93 %	83,80 %	83,84 %

**D. Arah Kebijakan, Strategi, Target Kinerja Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk**

Arah Kebijakan :

Peningkatan kualitas hidup di kawasan perkotaan dan perdesaan melalui pemerataan pembangunan, penataan penduduk, dan tata ruang berkelanjutan.

Strategi :

1. Revitalisasi kawasan perdesaan dengan penyediaan layanan dasar yang merata,
2. Pembangunan infrastruktur wilayah,

3. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa;
4. Penataan ruang perkotaan secara adaptif dan berkelanjutan;
5. Penyediaan ruang terbuka hijau,
6. Pengelolaan permukiman padat,
7. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

**Tabel 5**  
Target Kinerja Penataan Persebaran dan Pengarahannya Mobilitas Penduduk

Tujuan Strategis	Indikator	Base line 2024	Sumber Data	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Distribusi penduduk yang seimbang secara spasial, ekologis dan sosial	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	1,3%	BKKBN	2,2%	3,0%	3,8%	4,6%	5,4%
	Kepadatan Penduduk per km persegi	210	BPS	210	212	214	216	218

**E. Arah Kebijakan, Strategi, Target Kinerja Penataan Administrasi Data Kependudukan**

Arah Kebijakan :

Peningkatan cakupan dan kualitas layanan data kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta di kelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah di akses oleh pemangku kepentingan.

Strategi :

1. Pelayanan prima administrasi kependudukan;
2. Tertib administrasi kependudukan;
3. Integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber;
4. Peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan;

Tabel 6  
Target Kinerja Penataan Administrasi Data Kependudukan 2025-2029

Tujuan Strategis	Indikator	Base line 2024	Sumber Data	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Cakupan Layanan administrasi kependudukan untuk yang berkualitas dan akurat	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 tahun)	95,62 %	Dispenduk	97%	99%	99%	99%	99%
	Cakupan (Persentase) penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	16,76 %	Dispenduk	50%	60%	70%	80%	90%
	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah	25,92 %	Dispenduk	50%	60%	70%	75%	80%
	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	100%	Dispenduk	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB III

### RENCANA AKSI TAHUN 2025 – 2029

#### A. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan

Tata kelola pembangunan kependudukan merupakan serangkaian mekanisme, proses, dan kelembagaan yang bertujuan untuk mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan kependudukan di daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tata kelola ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan kependudukan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang terencana dan terpadu melalui kolaborasi berbagai sektor terkait.

Kelembagaan tata kelola pembangunan kependudukan di tingkat daerah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Sumba Barat, yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor. Tim ini bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan secara efektif, terintegrasi, dan terpadu. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan PJPK maka dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana PJPK Kabupaten Sumba Barat dengan struktur dan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat
5. Anggota :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
  - b. Kepala Dinas Kesehatan
  - c. Kepala Dinas Sosial
  - d. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
  - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - f. Kepala Badan Pusat Statistik
  - g. Kepala Badan Pendapatan Daerah

- h. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu

Secara umum adapun Tugas Tim Koordinasi Pelaksana PJKP adalah :

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan PJKP;
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program serta kegiatan pembangunan kependudukan antar sektor terkait Melakukan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan PJKP;
3. Mengevaluasi pelaksanaan PJKP;

Selain dari pada tugas tersebut, secara kelembagaan dapat dirinci tugas dan tanggung jawab sesuai urusan dan kewenangan sebagai berikut :

**1. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,**

Memiliki peran utama terhadap beberapa indikator PJKP sebagai berikut :

- a. Angka kelahiran total (total fertility rate) perwanita usia subur (15-49) tahun
- b. Indeks pembangunan keluarga (iBangga)
- c. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern
- d. Presentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)
- e. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).
- f. Penguatan peran Kampung KB sebagai pusat layanan pembangunan keluarga.
- g. Pengumpulan dan pelaporan indikator iBangga.

Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPKB) juga memiliki tugas operasional yang bisa dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan KB (MKJP, non-MKJP) melalui posyandu dan klinik KB.
- b. Menyusun modul edukasi remaja untuk menurunkan angka ASFR (kelahiran usia 15–19).
- c. Bekerja sama dengan desa dalam penguatan kelembagaan Kampung KB.
- d. Menyusun dan melaporkan iBangga secara berkala.

## 2. Dinas Kesehatan

Memiliki peran utama dalam melaksanakan kerja sesuai indikator peta jalan pembangunan kependudukan yaitu :

- a. Menurunkan Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Balita, dan prevalensi stunting.
- b. Menjamin cakupan JKN dan layanan kesehatan lansia.

Selain memiliki peran utama, Dinas Kesehatan juga memiliki tugas operasional sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan (bidan, dokter) di Puskesmas.
- b. Menyelenggarakan program 1.000 HPK untuk pencegahan stunting.
- c. Menyediakan layanan posyandu lansia dan skrining kesehatan rutin.
- d. Koordinasi dengan BPJS untuk perluasan cakupan JKN.

## 3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Memiliki peran utama yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah dengan kegiatan yang bisa dilaksanakan yaitu:

- a. Meningkatkan akses pendidikan Dasar dan Usia Dini
- b. Pemberian beasiswa untuk keluarga miskin dan Perempuan
- c. Menyusun kurikulum pendidikan kependudukan berbasis karakter.
- d. Kolaborasi dengan Dinas DP5A dalam kampanye pencegahan pernikahan usia dini.

## 4. Dinas Sosial

Memiliki peran utama untuk menangani penduduk miskin dan rawan sosial dengan tugas operasional sebagai berikut:

- a. Validasi dan verifikasi DTSEN secara berkala.
- b. Menyalurkan bantuan sosial berbasis data kependudukan.

## 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Memiliki peran utama dalam penyediaan sanitasi dan air bersih sebagai bagian dari lingkungan sehat dengan tugas operasional yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Membangun sarana sanitasi layak (SPAM, MCK) di kawasan padat penduduk.
- b. Rehabilitasi infrastruktur air bersih di daerah kumuh.
- c. Sinkronisasi program dengan data stunting dan kemiskinan.

**6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Memiliki peran utama dalam menjamin kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk. Adapun tugas operasional yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Perekaman dan pencetakan dokumen (KIA, KK, KTP-el, Akta Kelahiran/Kematian).
- b. Layanan jemput bola ke wilayah terpencil dan marginal.
- c. Integrasi data kependudukan dengan OPD layanan dasar (Dinkes, DPKO, Dinsos).

**7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Memiliki peran utama dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun tugas operasional yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam mengakses pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik.
- b. Mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB bagi UMKM)

**8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Memiliki peran utama dalam penyediaan infrastruktur dan lingkungan hidup yang layak untuk menunjang kualitas hidup penduduk dengan tugas operasional yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan perumahan yang layak huni, aman dan terjangkau bagi masyarakat.
- b. Penyediaan dan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

**B. Rencana Aksi Tahun 2025-2029**

**1. Rencana Aksi Pengelolaan Kuantitas Penduduk**

Tabel 7  
Program dan Kegiatan Pengelolaan Kuantitas Penduduk

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD Penanggung Jawab
1	TFR per WUS Usia 15-49 Tahun	Program Pengendalian Penduduk	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	ASFR 15-19 Tahun	Program Pengendalian Penduduk	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi (Demand Satisfied)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD Penanggungjawab
			Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## 2. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Penduduk

Tabel 8  
Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD PenanggungJawab
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda (Bagian Kesra)

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD PenanggungJawab
3	Prevalensi Stunting	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Dinas Kesehatan
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Penyuluhan Pertanian	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD PenanggungJawab
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Kawasan Permukiman	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD Penanggungjawab
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
		Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan
4	Jumlah Kasus Kematian Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
6	Tingkat Kemiskinan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendaftaran, Mitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat
			Kegiatan Pemberdayaan Melalui Mitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat
			Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD PenanggungJawab
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial
			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD PenanggungJawab
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
		Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
		Program Kawasan Permukiman	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Persentase Pekerja Informal	Program Hubungan Industrial	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD Penanggung Jawab
10	Gini Ratio	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
		Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri (AKAD)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat
			Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat
			Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD PenanggungJawab
				Sumba Barat
		Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat
			Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat
		Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
		Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD PenanggungJawab
		Program Penataan Bangunan Gedung	Kegiatanh Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
11	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Program Pengembangan Hortikultura Program Pengembangan Peternakan Program Pengolahan Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan alat dan mesin pertanian</li> <li>- Penyediaan benih unggul, pupuk, pestisida</li> <li>- Pelatihan pascapanen dan pengolahan produk</li> <li>- Revitalisasi irigasi dan embung pertanian</li> <li>- Pengembangan komoditas unggulan lokal</li> <li>- Fasilitasi akses pasar hasil pertanian</li> </ul>	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Destinasi Wisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan sarpras destinasi wisata</li> <li>- Penataan objek wisata (Pantai, Air Terjun, Budaya)</li> <li>- Promosi pariwisata (event, festival, digital marketing)</li> <li>- Pelatihan pelaku wisata (homestay, pemandu, kuliner)</li> <li>- Pengembangan desa wisata</li> <li>- Fasilitasi produk ekraf (tenun, kerajinan, kuliner)</li> </ul>	Dinas Pariwisata & Ekraf
		- Pengembangan UMKM & Koperasi - Peningkatan Daya Saing Produk UMKM - Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) - Program Fasilitasi Pemasaran & Sertifikasi Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan peningkatan kualitas produk UMKM</li> <li>- Fasilitasi sertifikasi (Halal, PIRT, SNI, NIB)</li> <li>- Pameran dagang &amp; promosi produk lokal</li> <li>- Pengembangan rumah produksi bersama</li> <li>- Bantuan alat produksi IKM</li> <li>- Fasilitasi pembiayaan UMKM</li> </ul>	Dinas Koperindag
		- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Pembangunan & peningkatan jalan strategis ekonomi	Dinas PUPR

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman</li> <li>- Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi</li> <li>- Program Penataan Ruang</li> <li>- Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>- Program Penguatan Iklim Investasi</li> <li>- Program Pelayanan Perizinan</li> <li>- Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja</li> <li>- Pendidikan Vokasi &amp; Link and Match Industri</li> <li>- Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi jembatan dan akses produksi pertanian</li> <li>- Pembangunan SPAM, sanitasi, irigasi</li> <li>- Penyusunan RDTR untuk investasi &amp; industri</li> <li>- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten</li> <li>- Promosi investasi (forum bisnis, investor gathering)</li> <li>- Fasilitasi perizinan berusaha (NIB, OSS)</li> <li>- Pendampingan investor hingga realisasi investasi</li> <li>- Menyiapkan regulasi kemudahan investasi daerah</li> <li>- Pelatihan berbasis kompetensi (BLK)</li> <li>- Sertifikasi profesi</li> <li>- Program magang industri</li> <li>- Pengembangan SMK pariwisata, hospitality, TIK</li> <li>- Pelatihan wirausaha muda</li> </ul>	<p>DPMPSTP</p> <p>Dinas Nakertrans dan Dinas PKO</p>
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>Program Penempatan Tenaga Kerja</li> </ul>	<p>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</p> <p>Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri (AKAD)</p>	<p>Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</p>

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD Penanggung Jawab
		Program Hubungan Industrial	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
13	Persentase Kepemilikan NPWP	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

### 3. Rencana Aksi Pembangunan Keluarga

Tabel 9  
Program dan Kegiatan Pembangunan Keluarga

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD Penanggungjawab
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Indeks Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota  Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Kawasan Permukiman	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD PenanggungJawab
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Indeks Lansia Berdaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Dinas Sosial

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD PenanggungJawab
6	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

#### 4. Rencana Aksi Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Tabel 10

Program dan Kegiatan Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD Penanggungjawab
1	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Kepadatan Penduduk	Program Pengendalian Penduduk Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
		Program Penataan Desa	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

5. Rencana Aksi Penataan Administrasi Data Kependudukan

Tabel 11

Program dan Kegiatan Penataan Administrasi Data Kependudukan

No	Indikator	Program	Kegiatan	PD Penanggung Jawab
1.	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 tahun)	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Cakupan (Persentase) penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## BAB IV

### PENUTUP

Penduduk adalah titik sentral pembangunan, karena di samping sebagai subyek (pelaku) pembangunan, penduduk sekaligus adalah obyek (penerima) hasil pembangunan. Kebijakan pembangunan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini, dan sekaligus juga mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang.

Tantangan besar persoalan kependudukan di Kabupaten Sumba Barat adalah laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang belum didukung oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. Penting untuk mewujudkan keselarasan potensi bonus demografi dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Kunci utama untuk mewujudkannya terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sumba Barat diarahkan pada terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat Sumba Barat yang lebih sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing, dan berbudaya.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana melalui komponen pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas, dan pembangunan basis data kependudukan yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi. Muaranya adalah upaya peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Sumba Barat baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025–2029 merupakan acuan strategis yang memandu arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan di daerah. Agar implementasi berbagai program, kegiatan, dan rencana aksi dalam peta jalan ini berjalan efektif, terintegrasi, dan menghasilkan dampak yang optimal, maka diperlukan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Pada bab ini dijelaskan secara terperinci langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses tersebut.

#### A. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan kependudukan berjalan sesuai

rencana. Dalam pelaksanaan monitoring, kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

1. Pemantauan Capaian Indikator Utama dan Indikator Kinerja
  - a. Memeriksa perkembangan capaian target indikator per tahun.
  - b. Melakukan tracking terhadap indikator pengendalian penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran penduduk, serta administrasi kependudukan.
2. Pengumpulan dan Validasi Data Secara Berkala
  - a. Memanfaatkan sumber data sektoral dari perangkat daerah serta data administrasi kependudukan.
  - b. Melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan ketepatan data.
3. Monitoring Lapangan (Field Monitoring)
  - a. Melakukan kunjungan lapangan pada program-program strategis seperti pelayanan KB, pencatatan sipil, edukasi keluarga, pelayanan kesehatan reproduksi, dan pelayanan kependudukan lainnya.
  - b. Mengidentifikasi hambatan teknis, operasional, maupun administrasi.
4. Rapat Koordinasi Monitoring Berkala
  - a. Mengadakan rapat koordinasi minimal triwulanan antara seluruh perangkat daerah terkait.
  - b. Membahas progres, hambatan, dan tindak lanjut yang diperlukan.
5. Penyusunan Catatan Hasil Monitoring  
Membuat ringkasan temuan monitoring sebagai dasar penyempurnaan program dan rekomendasi kebijakan.

## **B. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan strategi yang dilaksanakan dalam peta jalan. Evaluasi dilakukan secara mendalam melalui langkah-langkah berikut :

1. Evaluasi Tahunan Kinerja Program
  - a. Mengukur kesesuaian antara rencana kerja dan pelaksanaan.
  - b. Mengevaluasi input (sumber daya), proses (pelaksanaan), output (capaian kegiatan), dan outcome (perubahan yang dihasilkan).
2. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)
  - a. Mengidentifikasi perbedaan antara target dan realisasi capaian.
  - b. Menentukan faktor penyebab keterlambatan atau ketidaktercapaian.
3. Evaluasi Dampak (Impact Evaluation)
  - a. Mengkaji dampak jangka menengah terhadap kualitas penduduk, pengendalian penduduk, keluarga, persebaran, dan dokumen kependudukan.

- b. Menilai kontribusi program terhadap penguatan pembangunan kependudukan secara umum.
4. Evaluasi Kelembagaan dan Koordinasi
  - a. Mengkaji efektivitas peran perangkat daerah, integrasi data, serta koordinasi antar-sektor.
  - b. Mengidentifikasi kebutuhan penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia.
5. Evaluasi Akhir Periode (Endline Evaluation)
  - a. dilakukan pada akhir masa berlakunya peta jalan tahun 2029.
  - b. Menjadi dasar penyempurnaan peta jalan berikutnya atau integrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya.

### C. Pelaporan

Pelaporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan kependudukan. Pelaporan disiapkan secara berkala dengan mencakup unsur-unsur berikut:

1. Penyusunan Laporan Perangkat Daerah
  - a. Setiap perangkat daerah menyusun laporan kegiatan dan capaian indikator sesuai tugas masing-masing.
  - b. Laporan memuat progres, hambatan, solusi, dan rekomendasi.
2. Laporan Triwulanan
  - a. Berisi pembaruan perkembangan kegiatan serta respons cepat terhadap isu-isu yang muncul.
  - b. Menjadi dasar penyesuaian kegiatan pada triwulan berikutnya.
3. Laporan Tahunan Pembangunan Kependudukan
  - a. Dihimpun oleh Tim Koordinasi Pelaksana PJPK Kabupaten Sumba Barat.
  - b. Berisi analisis capaian, progres target, hambatan utama, penggunaan anggaran, dan rekomendasi strategis.
4. Laporan Akhir Periode 2025–2029
  - a. Menggambarkan kinerja menyeluruh selama lima tahun pelaksanaan peta jalan.
  - b. Menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan pada periode berikutnya.
5. Penyampaian Laporan ke Pemerintah Provinsi dan Nasional

Laporan yang telah disusun akan disampaikan kepada pemerintah provinsi dan instansi terkait di tingkat pusat sebagai bagian dari mekanisme pembinaan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan.

Melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara sistematis

sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumba Barat 2025–2029 dapat berjalan dengan efektif, adaptif, dan memberikan hasil nyata bagi peningkatan kualitas penduduk serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses ini secara konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan kependudukan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

**BUPATI SUMBA BARAT,**

  
**YOHANIS DADE**